



2021

LAPORAN KINERJA (LKj)

SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN

TAHUN 2021



LAPORAN KINERJA

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021 untuk pencapaian sampai dengan bulan Desember dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Laporan Kinerja (LKj) merupakan salah satu cara perbaikan kinerja organisasi yang harus terus dilakukan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan transparan. Laporan ini disusun secara periodik berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, maka setiap Instansi Pemerintah harus menyusun Laporan Kinerja (LKj).

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan telah berupaya melakukan berbagai Program dan Kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, mulai dari perencanaan, pelaksanaan Anggaran dan pencapaian hasilnya, serta pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah ini.

Dalam pelaksanaan Program/kegiatan dalam tahun anggaran 2021, masih ditemui beberapa kendala-kendala dalam pelaksanaannya namun dengan dukungan berbagai pihak terutama Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan instansi terkait, semua hambatan-hambatan tersebut dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Laporan ini akan dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk pelaksanaan program dan kegiatan dimasa yang akan datang agar semakin baik dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Pesisir Selatan.

Painan, Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESIR SELATAN



MAWARDI ROSKA, S.IP.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19670907 198902 1 001

LAPORAN KINERJA

IKHTISAR EKSEKUTIF

Untuk mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik maka salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah dengan menyusun Laporan Kinerja (LKj). Pelaporan yang terukur dan berkesinambungan diharapkan dapat meningkatkan kapasitas kelembagaan untuk mencapai peningkatan kinerja menjadi lebih baik

Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Daerah tahun 2021 ini disusun untuk memenuhi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan LKj dilakukan dengan berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Sekretariat Daerah sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Sekretariat Daerah fungsi utamanya sebagai koordinator dalam melaksanakan program-program pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah adalah kegiatan yang bersifat rutinitas dan ada beberapa program atau kegiatan yang sifatnya sekali jalan. Dengan demikian penetapan sasaran dan target pada Indikator Kinerja Utama bukanlah merupakan akumulasi kinerja selama tahun renstra yaitu tahun 2021 s/d 2026, namun merupakan sasaran dan target untuk pelaksanaan satu tahunan.

Dari 6 Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah, 5 diantaranya dapat dilaksanakan dengan **sangat berhasil** yaitu dengan nilai > 95 %, hanya 1 indikator yang masih < 95% atau pada kondisi berhasil. Evaluasi atas data-data pendukung dan permasalahan atas setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Sekretariat Daerah kedepan adalah Pertama, walaupun beberapa IKU telah mencapai target yang sangat baik, namun untuk masa yang akan datang perlu dilakukan penyempurnaan IKU supaya lebih fokus pada tupoksi Sekretariat Daerah dalam menunjang pencapaian misi Kabupaten Pesisir Selatan. Kedua, Perlu dirumuskan kembali program-program dan kegiatan yang benar benar menunjang secara langsung pencapaian target sasaran dengan mengefisienkan jumlah program dan kegiatan yang fokus pada pencapaian sasaran.

Hasil evaluasi capaian kinerja diharapkan dapat dijadikan acuan dalam penentuan kebijakan dimasa mendatang dan dapat memberikan kontribusi positif dalam penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

LAPORAN KINERJA

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi	2
D. Identifikasi Permasalahan	6
E. Isu Strategis	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. Indikator Kinerja Utama	09
B. Perjanjian Kinerja	11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	29
A. Capaian Kinerja Organisasi	29
B. Realisasi Anggaran	34
BAB IV PENUTUP	44

LAPORAN KINERJA

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, maka setiap Instansi Pemerintah harus menyusun Laporan Kinerja (LKj).

Laporan Kinerja merupakan bentuk pertanggung jawaban atas capaian kinerja organisasi/Instansi Pemerintah secara transparan dan akuntabel, untuk itu pada setiap akhir tahun anggaran Sekretariat Daerah sebagai salah satu Perangkat Daerah (PD) pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan menyusun Laporan Kinerja. Laporan Kinerja ini disusun untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Sekretariat Daerah tahun 2021. Akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah diwujudkan melalui pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja program dan kegiatan yang menjadi tujuan dalam sasaran strategis Sekretariat Daerah.

Penyusunan LKj dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. LKj Sekretariat Daerah disampaikan kepada Bupati Pesisir Selatan untuk dikompilasi menjadi LKj Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

LAPORAN KINERJA

B. MAKSUD DAN TUJUAN

B.1. Maksud Laporan

1. Memberikan informasi perkembangan pelaksanaan tugas Sekretariat Daerah
2. Memberikan informasi perkembangan realisasi fisik dan keuangan yang dikelola Sekretariat Daerah
3. Memberikan informasi kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas tiap bulan
4. Menemukan alternatif pemecahan permasalahan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran
5. Proses evaluasi dan perbaikan yang berkelanjutan terhadap kinerja Sekretariat Daerah agar dapat meningkatkan kinerja pemerintahan melalui peningkatan kinerja Sekretariat Daerah dalam memberikan pelayanan terhadap publik.

B.2. Tujuan Laporan

1. Sebagai sarana laporan pelaksanaan tugas Sekretariat Daerah kepada Bupati
2. Salah satu bahan informasi dalam proses pengambilan kebijakan penyelenggaraan kegiatan Sekretariat Daerah
3. Sebagai bahan peningkatan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dalam penyelenggaraan kegiatan Sekretariat Daerah.

C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI

Sekretariat Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yang saat ini dipimpin oleh Mawardi Roska, S.IP sebagai Sekretaris Daerah.

C.1 Kedudukan

Sekretariat Daerah merupakan unsur staf yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.

LAPORAN KINERJA

C.2 Tugas

Sekretariat Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif.

C.3 Fungsi

- a. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah;
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
- d. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada perangkat daerah; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan petunjuk dan arahan.

C.4 Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten terdiri dari :

A. Sekretaris Daerah

B. Asisten

Asisten terdiri dari :

1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi 3 (tiga) Bagian, sebagai berikut :
 - a. Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama, membawahi:
 1. Sub Bagian Administrasi Pemerintahan dan Kewilayahan;
 2. Sub Bagian Otonomi Daerah; dan
 3. Sub Bagian Kerjasama.
 - b. Bagian Kesejahteraan Rakyat, membawahi:
 1. Sub Bagian Kesejahteraan Sosial;
 2. Sub Bagian Kesejahteraan Masyarakat; dan
 3. Sub Bagian Bina Mental Spiritual.

LAPORAN KINERJA

- c. Bagian Hukum, membawahi :
 1. Sub Bagian Perundang-undangan;
 2. Sub Bagian Bantuan Hukum; dan
 3. Sub Bagian Dokumentasi Informasi.
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membawahi 3 (tiga) Bagian, sebagai berikut :
 - a. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, membawahi:
 1. Sub Bagian Perekonomian;
 2. Sub Bagian Sumber Daya Alam; dan
 3. Sub Bagian Pembinaan Badan Layanan Umum Daerah dan Bina Badan Usaha Milik Daerah.
 - b. Bagian Administrasi Pembangunan, membawahi:
 1. Sub Bagian Penyusunan Program;
 2. Sub Bagian Pengendalian Program; dan
 3. Sub Bagian Evaluasi Pelaporan.
 - c. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, membawahi:
 1. Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa;
 2. Sub Bagian Layanan Pengadaan secara Elektronik; dan
 3. Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa.
3. Asisten Administrasi Umum, membawahi 4 (empat) Bagian, sebagai berikut :
 - a. Bagian Umum, membawahi :
 1. Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perlengkapan; dan
 3. Sub Bagian Rumah Tangga.
 - b. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan; membawahi :
 1. Sub Bagian Protokol;
 2. Sub Bagian Komunikasi Pimpinan; dan
 3. Sub Bagian Dokumentasi Pimpinan.
 - c. Bagian Organisasi membawahi:
 1. Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan

LAPORAN KINERJA

2. Sub Bagian Pelayanan Publik dan Tata Laksana; dan
3. Sub Bagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi;
- d. Bagian Perencanaan dan Keuangan, membawahi:
 1. Sub Bagian Perencanaan;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Pelaporan.

C. Kelompok Jabatan Fungsional

D. Staf Ahli Bupati

Staf Ahli Bupati terdiri dari :

- 1) Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik.
- 2) Staf Ahli Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan.
- 3) Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.

C.5 Sumberdaya Manusia (SDM) Sekretariat Daerah.

Dalam menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Sekretariat Daerah didukung oleh 207 orang Pegawai sebagaimana tergambar pada tabel-tabel berikut :

Tabel 1
Jumlah Aparatur Berdasarkan Jabatan

No.	Jabatan	Jumlah Pegawai
1.	Pejabat Struktural Eselon II.A	1 Orang
2.	Pejabat Struktural Eselon II.B	6 Orang
3.	Pejabat Struktural Eselon III.a	10 Orang
4.	Pejabat Struktural Eselon IV.a	30 Orang
5.	Staf Pelaksana (PNS)	84 Orang
6.	Staf Pelaksana (Kontrak)	76 Orang
		207 Orang

LAPORAN KINERJA

Tabel 2
Jumlah Aparatur Berdasarkan Golongan

No.	Golongan	Jumlah Pegawai
1.	Golongan IV	33 Orang
2.	Golongan III	78 Orang
3.	Golongan II	20 Orang
4.	Golongan I	0 Orang
5.	Non PNS	76 Orang
		207 Orang

Tabel 3
Jumlah Aparatur Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No.	Jenjang Pendidikan	Jumlah Pegawai
1.	S2	24 Orang
2.	S1	70 Orang
3.	DIII	10 Orang
4.	SLTA	22 Orang
5.	SLTP	1 Orang
		131 Orang

D. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

1. Terlambatnya pengelola keuangan pada masing-masing Bagian Sekretariat Daerah dan melaporkan realisasi keuangan, realisasi fisik dan surat pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan.
2. Belum tersedia sistem aplikasi yang dapat menyimpan data - data kepegawaian serta arsip – arsip kepegawaian secara *on line* / *komputerisasi*.
3. Belum adanya prosedur dan aturan yang dihasilkan tim tentang kebijakan dan pengawasan jasa konstruksi.
4. Masih banyak Perangkat Daerah yang tidak mengirimkan Rencana Umum Pengadaan Perangkat Daerah di awal tahun anggaran

LAPORAN KINERJA

5. Pemberian Bonus, honor peserta dan pelatih pelaksana MTQ Provinsi masih terlalu kecil.
6. Banyak masyarakat yang belum mengerti tata cara penyusunan hibah dan bantuan sosial ini dalam anggaran.
7. Belum terlaksananya validasi terhadap data guru TPA/TPQ dan MDTA
8. Keterbatasan Sarana dan Prasarana dalam penunjang terlaksananya Kegiatan Penyusunan LPPD.
9. Masih kurangnya kesadaran aparaturnya dalam mengikuti upacara hari kesadaran nasional dan hari besar lainnya.
10. Adanya petugas titik distribusi Raskin yang sering terlambat menyeter hasil penjualan beras Raskin ke Bulog, sehingga pendistribusian Raskin bulan berikutnya terlambat.
11. Belum optimalnya sistem evaluasi dan pengendalian pembangunan.

E. Isu Strategis

Analisis isu strategis dilakukan melalui proses *brainstorming* dan *mapping* jenis layanan yang telah dilakukan oleh Sekretariat Daerah, faktor pendorong dan penghambat pelaksanaan layanan, tantangan dan peluang pengembangan layanan. Berdasarkan proses analisis tersebut, maka isu strategis Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi dalam rangka mendukung kinerja manajemen pemerintahan daerah.
2. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan otonomi daerah melalui pelaksanaan urusan pemerintahan secara efektif dan efisien untuk optimalisasi pendayagunaan potensi daerah.
3. Meningkatkan pendayagunaan pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan kebutuhan, kemampuan dan prioritas daerah.
4. Mendayagunakan sarana dan prasarana dalam mendorong kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.
5. Mengembangkan sistem informasi yang mendukung manajemen pemerintahan daerah secara terpadu dan berkesinambungan.

LAPORAN KINERJA

6. Menekan dampak permasalahan budaya masyarakat dengan peningkatan aktivitas perekonomian berbasis pariwisata yang menjadikan kunjungan wisatawan sebagai sumber pemasukan PAD sehingga akan meningkatkan Pendapatan dan meningkatkan alokasi anggaran belanja kegiatan.
7. Pengembangan sarana dan prasarana penunjang daerah untuk memfasilitasi kunjungan wisatawan dan meminimalisir dampak negative atau pengaruh buruk akibat kedatangan wisatawan tersebut.
8. Reformasi manajemen keuangan dan aset daerah dalam rangka mewujudkan sistem anggaran yang berbasis kinerja, ekonomis, efisien dan efektif.
9. Kinerja manajemen pemerintah daerah melalui restrukturisasi kelembagaan, kewenangan, SOP, penerapan standar pelayanan minimal dalam rangka meningkatkan tingkat kepuasan layanan publik.
10. Perbaikan manajemen pelayanan publik dilakukan melalui reformasi birokrasi dan pelayanan publik melalui penataan sejumlah kelembagaan, kewenangan, strategi dan sejumlah langkah aksi (*action plan*) melalui sejumlah inovasi birokrasi pemerintahan.
11. Upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui pembuatan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) setiap SKPD.

LAPORAN KINERJA

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja merupakan alat atau sarana yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran. Indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (*reliable*) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya.

Selanjutnya indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggungjawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Berbagai peraturan perundang-undangan sudah mewajibkan instansi pemerintah untuk menentukan indikator kinerja pada saat membuat perencanaan. Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Berdasarkan urusan dan program yang dilaksanakan Sekretariat Daerah dalam mendukung pencapaian misi Kabupaten Pesisir Selatan yang tercantum pada RPJMD yaitu :

- a. Misi 1 : **Memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan**
- b. Misi 2 : **Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat.**

LAPORAN KINERJA

- c. Misi 3 : Memperkuat kemandirian ekonomi dengan mendorong sector potensi dan unggulan daerah
- d. Misi 4 : Mewujudkan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai Daerah Tujuan Wisata yang nyaman dan berkesan.
- e. Misi 5 : Mewujudkan Pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan sumberdaya manusia yang beriman, kreatif dan berdaya saing.
- f. Misi 6 : Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tentram dan dinamis.

Tabel 4
Indikator Kinerja Utama Tahun 2021-2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	TARGET KINERJA PADA TAHUN					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Kualifikasi Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	68,00 (BB)	70,00 (BB)	72,00 (BB)	75,00 (BB)	76,00 (BB)	78,00 (BB)
		Skor Nilai LPPD	3,2090	3,2150	3,2230	3,2290	3,2340	3,2400
2	Meningkatnya Kapabilitas Birokrasi	Indeks Kelembagaan	P-3 (Cukuf Efektif)	P-3 (Cukuf Efektif)	P-4 (Efektif)	P-4 (Efektif)	P-5 (Sangat Efektif)	P-5 (Sangat Efektif)
3	Meningkatnya Keterbukaan Informasi dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan terhadap Masyarakat Pelayanan Publik	80.00	82.00	84.00	85.00	85.00	85.00
4	Meningkatnya pengamalan nilai-nilai agama dalam kehidupan masyarakat	Pemenuhan kewajiban membayar zakat harta	96,40%	96,50%	96,60%	96,70%	96,80%	100%
		Tingkat partisipasi subuh berjamaah di Mesjid/Mushalla	Rendah (≤ 10 Orang)	Rendah (≤ 10 Orang)	Sedang (11 s/d 20 Orang)	Sedang (11 s/d 20 Orang)	Tinggi (≥ 21 Orang)	Tinggi (≥ 21 Orang)

LAPORAN KINERJA

B. PERJANJIAN KINERJA

Penyusunan perjanjian kinerja tahun 2021 mengacu pada Revisi Renstra Tahun 2021-2026. Secara garis besar perjanjian kinerja tahun 2026 meliputi 5 sasaran strategis, pengukuran pencapaian sejumlah sasaran tersebut dilakukan melalui 8 indikator kinerja sasaran beserta targetnya. Perjanjian kinerja telah ditetapkan secara berjenjang mulai dari eselon II, eselon III dan eselon IV sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5
Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	PROGRAM DAN KEGIATAN
1	2	3	4	5	6
	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Kualifikasi Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	68,00 (B)	68,00 (B)	
		Skor Nilai LPPD	3,2090	3,2090	
	Meningkatnya Kapabilitas Birokrasi	Indeks Kelembagaan	P-3 (Cukuf Efektif)	P-3 (Cukuf Efektif)	
	Meningkatnya Keterbukaan Informasi dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan terhadap Masyarakat Pelayanan Publik	80	80	
		Persentase peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah	80%	80%	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM
		Persentase Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja sekretariat daerah	100%	100%	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

LAPORAN KINERJA

		Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan Sekretariat Daerah	100%	100%	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	124 Org	124 Org	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	8 Dokumen	8 Dokumen	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	20 Laporan	20 Laporan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
		Persentase pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah Sekretariat Daerah	100%	100%	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan (Persediaan, Laporan Mutasi Barang, Belanja Modal dan RKBMD)	4 Laporan (Persediaan, Laporan Mutasi Barang, Belanja Modal dan RKBMD)	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
		Persentase pengelolaan Administrasi Umum Sekretariat Daerah	100%	100%	Administrasi Umum Perangkat Daerah

LAPORAN KINERJA

		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	3 Laporan	3 Laporan	Fasilitas Kunjungan Tamu
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	55 Dokumen	55 Dokumen	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
		Jumlah Barang Milik Daerah yang diusulkan pada RKBMD	15 Unit	15 Unit	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	Pengadaan Mebel
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	5 Unit	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		Jumlah dana untuk Jasa penunjang urusan Sekretariat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan (Surat Masuk, Surat Keluar, Nota Dinas, Surat Keputusan)	4 Laporan (Surat Masuk, Surat Keluar, Nota Dinas, Surat Keputusan)	Penyediaan Jasa Surat Menyurat

LAPORAN KINERJA

		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	36 Laporan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	5 Laporan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		Jumlah Barang Milik Daerah di Sekretariat Daerah yang dipelihara	85 unit	85 unit	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7 Unit Mobil/ 4 Unit Motor	7 Unit Mobil/ 4 Unit Motor	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit Mobil/41 Unit Motor	15 Unit Mobil/41 Unit Motor	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
		Jumlah Mebel yang Dipelihara	4 Unit	4 Unit	Pemeliharaan Mebel
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	79 Unit	79 Unit	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

LAPORAN KINERJA

		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
		Jumlah dana untuk biaya administrasi keuangan dan operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12 Bulan	12 Bulan	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
		Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
		Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang	2 Orang	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
		Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	±400 Org	±400 Org	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
		Jumlah dana yang disediakan untuk biaya fasilitasi rumahtangga Sekretariat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah

LAPORAN KINERJA

		Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah
		Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah
		Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah
		Persentase penataan organisasi perangkat daerah Kabupaten Pesisir Selatan	100%	100%	Penataan Organisasi
		Indeks Reformasi Birokrasi	56	56	
		Kualifikasi Penilaian Akuntabilitas Instansi Pemerintah	68	68	
		Indeks Kelembagaan	P-3 CUKUP EFEKTIF	P-3 CUKUP EFEKTIF	
		Indeks Kepuasan terhadap masyarakat pelayanan Publik	80	80	
		Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	2 Dokumen	2 Dokumen	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan

LAPORAN KINERJA

		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	4 Laporan (Inovasi Pelayanan Publik, Indeks Kepuasan Masyarakat, Surfey Pelayanan Publik, Fasilitasi Pelayanan Prima)	4 Laporan (Inovasi Pelayanan Publik, Indeks Kepuasan Masyarakat, Surfey Pelayanan Publik, Fasilitasi Pelayanan Prima)	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana
		Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	3 dokumen (Hasil Surfey Internal, Road Map 2021-2026, Indek RB)	3 dokumen (Hasil Surfey Internal, Road Map 2021-2026, Indek RB)	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi
		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Dokumen	1 Dokumen	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana
		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	4 Dokumen (Lakip, Rencana Aksi, Capaian Kinerja Pemda, Perjanjian Kinera Pemda)	4 Dokumen (Lakip, Rencana Aksi, Capaian Kinerja Pemda, Perjanjian Kinera Pemda)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah
		Jumlah pelaksanaan kegiatan protokoler dan komunikasi pimpinan serta kerja sama media	12 Bulan	12 Bulan	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan
		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	1 Laporan	1 Laporan	Fasilitasi Keprotokolan

LAPORAN KINERJA

		Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Komunikasi Pimpinan	2 Laporan	2 Laporan	Fasilitas Komunikasi Pimpinan
		Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	2 Laporan	2 Laporan	Pendokumentasian Tugas Pimpinan
		Persentase peran serta pemerintah daerah untuk meningkatkan kegiatan keagamaan dan sosial kemasyarakatan	100%	100%	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
		Persentase capaian kinerja untuk penataan pemerintahan dan otonomi Daerah	100%	100%	Administrasi Tata Pemerintahan
		Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	3 Dokumen	3 Dokumen	Penataan Administrasi Pemerintahan
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	5 Dokumen	5 Dokumen	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah	3 Dokumen (LPPD, LKPj, SPM)	3 Dokumen (LPPD, LKPj, SPM)	Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah
		Indeks Daya saing Daerah Bidang SDM	Tinggi (3,150)	Tinggi (3,150)	
	Meningkatnya pengamalan nilai-nilai agama dalam kehidupan masyarakat	Pemenuhan kewajiban membayar zakat harta	96,40%	96,40%	
		Tingkat partisipasi subuh berjamaah di Mesjid/Mushalla	Rendah (≤ 10 Orang)	Rendah (≤ 10 Orang)	

LAPORAN KINERJA

		Jumlah fasilitasi pengelolaan kesejahteraan sosial dan masyarakat yang dilakukan	79 Kali	79 Kali	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	7 Dokumen	7 Dokumen	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
		Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	6 Dokumen	6 Dokumen	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial
		Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	4 Dokumen	4 Dokumen	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat

LAPORAN KINERJA

		Persentase yang dapat diberikan oleh pemerintah daerah terhadap fasilitasi bantuan hukum yang dilakukan	100%	100%	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum
		Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	986 dokumen	986 dokumen	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah
		Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	3 kasus	3 kasus	Fasilitasi Bantuan Hukum
		Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	25 Berita Daerah dan 250 Lembaran Daerah	25 Berita Daerah dan 250 Lembaran Daerah	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum
		Persentase kerjasama yang difasilitasi oleh pemerintah daerah	100%	100%	Fasilitasi Kerjasama Daerah
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	5 Dokumen	5 Dokumen	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri
		Persentase peningkatan Layanan Bidang Perekonomian dan Pembangunan	100%	100%	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
		Persentase peningkatan perekonomian di Kabupaten Pesisir Selatan	100%	100%	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	2 Dokumen (BPR Samudra, PDAM)	2 Dokumen (BPR Samudra, PDAM)	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD

LAPORAN KINERJA

		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	2 Laporan (Inflasi, TPAKD)	2 Laporan (Inflasi, TPAKD)	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian
		Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	1 Dokumen	1 Dokumen	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil
		Persentase pelaksanaan Administrasi Pembangunan	100%	100%	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	4 Dokumen (ASB, HSPK, Pedoman APBD, Sisdur Perjalanan Dinas)	4 Dokumen (ASB, HSPK, Pedoman APBD, Sisdur Perjalanan Dinas)	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan
		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	20 Laporan	20 Laporan	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan
		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	12 Laporan	12 Laporan	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan
		Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa pada Pemerintah Daerah Kab. Pesisir Selatan	100%	100%	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	100 Dokumen	100 Dokumen	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
		Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	41 Dokumen	41 Dokumen	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik

LAPORAN KINERJA

		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	3 Orang	3 Orang	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
		Persentase pelaksanaan Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Sumber Daya Alam	100%	100%	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	5 Dokumen	5 Dokumen	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	3 Dokumen	3 Dokumen	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup

LAPORAN KINERJA

		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	2 Dokumen	2 Dokumen	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air
		Terciptanya Kondisi Masyarakat Pesisir Selatan yang aman tentram dan dinamis	100%	100%	
	Meningkatnya Keamanan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Jumlah Potensi Konflik di Pesisir Selatan	5	5	
	Meningkatnya Kualitas Demokrasi di Pesisir Selatan	Persentase Pemilu Aman, Jujur dan Adil	100%	100%	
					KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		Persentase peningkatan Pengetahuan Masyarakat tentang Wawasan Kebangsaan dan Kesadaran Bela Negara	85%	85%	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN
		Persentase Peningkatan rasa kesadaran dalam mewujudkan kecintaan berbangsa dan bernegara	85%	85%	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

LAPORAN KINERJA

		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	4 Orang	4 Orang	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
		Persentase pemahaman politik dikalangan masyarakat/aparat daerah serta terciptanya stabilitas politik pemerintahan yang kondusif di daerah	85%	85%	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK
		Persentase kebijakan pemerintah dalam penanganan perkembangan politik di daerah	85%	85%	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik

LAPORAN KINERJA

		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	13 parpol	13 parpol	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
		Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	4 Laporan	4 Laporan	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
		Persentase hasil Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi kemasyarakatan	85%	85%	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

LAPORAN KINERJA

		Pembinaan dan peningkatan kualitas komunikasi dengan Organisasi Kemasyarakatan (ORMAS/LSM)	12 Bulan	12 Bulan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
		Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	4 Laporan	4 Laporan	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
		Persentase hasil Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	85%	85%	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA
		Terlaksananya Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	12 Bulan	12 Bulan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	75 Siswa per-Kecamatan dan 7 orang per-Nagari	75 Siswa per-Kecamatan dan 7 orang per-Nagari	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

LAPORAN KINERJA

		Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	4 Laporan	4 Laporan	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
		Persentase hasil capaian Kondusifitas Pemerintah dalam bidang Perlindungan Masyarakat	85%	85%	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
		Jumlah konflik sosial yang tetangani melalui koordinasi pelaksanaan pemantapan kewaspadaan Nasional	4 Konflik	4 Konflik	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial
		Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	35 kali	35 kali	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah

LAPORAN KINERJA

		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	4 Orang	4 Orang	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
		Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	4 Laporan	4 Laporan	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah

LAPORAN KINERJA

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

A.1 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Tahun 2021

Indikator kinerja merupakan dasar pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Karakteristik indikator kinerja Sekretariat Daerah bersifat positif, yaitu semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian yang semakin baik. Untuk skala pengukuran kinerja dan predikatnya adalah sebagai berikut :

- Capaian kinerja >95% sampai dengan 100% = Sangat Berhasil;
- Capaian kinerja >80% sampai dengan 95% = Berhasil;
- Capaian kinerja >50% sampai dengan 80% = Cukup Berhasil;
- Capaian kinerja <50% = Kurang Berhasil.

Capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan indikator kinerja sasaran. Perumuan indikator kinerja sasaran lebih difokuskan pada indikator kinerja makro serta indikator kinerja strategis. Secara rinci capaian masing-masing indikator kinerja sasaran tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 6
Realisasi Sasaran Strategis Tahun 2021

Sasaran	Indikator Sasaran	Cara Penghitungan Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran		Realisasi	Tingkat Capaian %	Predikat
			Satuan	Tahun 2021			
Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Kualifikasi Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai Hasil Evaluasi Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	68,00 (B)	68,00 (B)	68,00 (B)	100%	Sangat Berhasil

LAPORAN KINERJA

	Skor Nilai LPPD	Nilai Hasil Evaluasi Kementerian Dalam Negeri	3,2090	3,2090	3,2090	100%	Sangat Berhasil
Meningkatnya Kapabilitas Birokrasi	Indeks Kelembagaan	Nilai Kelembagaan	P-3 (Cukuf Efektif)	P-3 (Cukuf Efektif)	P-3 (Cukuf Efektif)	100%	Sangat Berhasil
Meningkatnya Keterbukaan Informasi dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan terhadap Masyarakat Pelayanan Publik	Rata-rata Nilai Survey Indeks Kepuasan Masyarakat pada OPD yang di Survey	80	80	B (80.00)	100%	Sangat Berhasil
Meningkatnya pengamalan nilai-nilai agama dalam kehidupan masyarakat	Pemenuhan kewajiban membayar zakat harta	Persentase Zakat	96,40%	96,40%	96,40%	100%	Sangat Berhasil
	Tingkat partisipasi subuh berjamaah di Mesjid/Mushalla	Tingkat Partisipasi	100%	Rendah (≤ 10 Orang)	Rendah (≤ 10 Orang)	100%	Sangat Berhasil
Meningkatnya Keamanan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Jumlah Potensi Konflik di Pesisir Selatan	Jumlah Konflik	5	5	5	100%	Sangat Berhasil
Meningkatnya Kualitas Demokrasi di Pesisir Selatan	Persentase Pemilu Aman, Jujur dan Adil	Persentase	100%	100%	100%	100%	Sangat Berhasil

LAPORAN KINERJA

Sedangkan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis organisasi yang memiliki nilai paling strategis dibandingkan indikator lainnya. IKU merupakan bagian dari indikator kinerja sasaran strategis.

Tabel 7
Realisasi IKU Tahun 2021

Sasaran	Indikator Sasaran	Cara Penghitungan Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran		Realisasi	Tingkat Capaian %	Predikat
			Satuan	Tahun 2021			
Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Kualifikasi Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai Hasil Evaluasi Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	68,00 (B)	68,00 (B)	68,00 (B)	100%	Sangat Berhasil
	Skor Nilai LPPD	Nilai Hasil Evaluasi Kementerian Dalam Negeri	3,2090	3,2090	3,2090	100%	Sangat Berhasil
Meningkatnya Kapabilitas Birokrasi	Indeks Kelembagaan	Nilai Kelembagaan	P-3 (Cukuf Efektif)	P-3 (Cukuf Efektif)			
Meningkatnya Keterbukaan Informasi dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan terhadap Masyarakat Pelayanan Publik	Rata-rata Nilai Survey Indeks Kepuasan Masyarakat pada OPD yang di Survey	80	80	B (80.00)	100%	Sangat Berhasil
Meningkatnya pengamalan nilai-nilai agama dalam kehidupan masyarakat	Pemenuhan kewajiban membayar zakat harta	Persentase Zakat	96,40%	96,40%	96,40%	100%	Sangat Berhasil
	Tingkat partisipasi subuh berjamaah di Mesjid/Mushalla	Tingkat Partisipasi	100%	100%	100%	100%	Sangat Berhasil
Meningkatnya Keamanan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Jumlah Potensi Konflik di Pesisir Selatan	Jumlah Konflik	5	5	5	100%	Sangat Berhasil
Meningkatnya Kualitas Demokrasi di Pesisir Selatan	Persentase Pemilu Aman, Jujur dan Adil	Persentase	100%	100%	100%	100%	Sangat Berhasil

LAPORAN KINERJA

A.2 Realisasi Kinerja Sasaran Tahun 2020 dan 2021

Perjanjian Kinerja Tahun 2021 merupakan bagian dari kinerja strategis Sekretariat Daerah sebagaimana yang tercantum pada Renstra Periode Tahun 2021-2026. Pencapaian kinerja tahun pertama Renstra dibandingkan dengan capaian kinerja tahun terakhir periode Renstra Tahun 2021-2026 untuk mengetahui kecenderungan/trend meningkat atau menurun dari tahun sebelumnya.

Tabel 8
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2020 dan Tahun 2021

Sasaran	Indikator Sasaran	Cara Penghitungan Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2021	Realisasi
Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Kualifikasi Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai Hasil Evaluasi Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Nilai	68,00 (B)	68,00 (B)
	Skor Nilai LPPD	Nilai Hasil Evaluasi Kementerian Dalam Negeri	Nilai	3,2090	3,2090
Meningkatnya Kapabilitas Birokrasi	Indeks Kelembagaan	Nilai Kelembagaan	Nilai	NOL	NOL
Meningkatnya Keterbukaan Informasi dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan terhadap Masyarakat Pelayanan Publik	Rata-rata Nilai Survey Indeks Kepuasan Masyarakat pada OPD yang di Survey	Nilai	80	B (80.00)
Meningkatnya pengamalan nilai-nilai agama dalam kehidupan masyarakat	Pemenuhan kewajiban membayar zakat harta	Persentase Zakat	Persentase	96,40%	96,40%
	Tingkat partisipasi subuh berjamaah di Mesjid/Mushalla	Tingkat Partisipasi	100%	Rendah (≤ 10 Orang)	Rendah (≤ 10 Orang)
Meningkatnya Keamanan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Jumlah Potensi Konflik di Pesisir Selatan	Jumlah Konflik	Jumlah	5	5
Meningkatnya Kualitas Demokrasi di Pesisir Selatan	Persentase Pemilu Aman, Jujur dan Adil	Persentase	Persentase	100%	100%

LAPORAN KINERJA

A.3. Realisasi Kinerja Sasaran Tahun 2021 dan Target Kinerja Sasaran Tahun 2022

Indikator kinerja sasaran Tahun 2021 merupakan ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Periode Tahun 2021-2026. Pencapaian kinerja tahun kelima (2021) Renstra dibandingkan dengan capaian kinerja tahun terakhir periode Renstra (2021) untuk mengetahui kemampuan Sekretariat Daerah selama 5 tahun kedepan dalam mencapai target akhir periode. Perbandingan antara realisasi/capaian kinerja Tahun 2020 dan Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 9
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2021 dan Target Tahun 2022

Sasaran	Indikator Sasaran	Cara Penghitungan Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi Tahun 2021	Target Tahun 2022
Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Kualifikasi Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai Hasil Evaluasi Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Nilai	70,00 (B)	68,00 (B)
	Skor Nilai LPPD	Nilai Hasil Evaluasi Kementerian Dalam Negeri	Nilai	3,2150	3,2090
Meningkatnya Kapabilitas Birokrasi	Indeks Kelembagaan	Nilai Kelembagaan	Nilai	P-3 (Cukuf Efektif)	
Meningkatnya Keterbukaan Informasi dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan terhadap Masyarakat Pelayanan Publik	Rata-rata Nilai Survey Indeks Kepuasan Masyarakat pada OPD yang di Survey	Nilai	82	B (80.00)
Meningkatnya pengamalan nilai-nilai agama dalam kehidupan masyarakat	Pemenuhan kewajiban membayar zakat harta	Persentase Zakat	Persentase	96,50%	96,40%
	Tingkat partisipasi subuh berjamaah di Mesjid/Mushalla	Persentase	100%	Rendah (≤ 10 Orang)	Rendah (≤ 10 Orang)

LAPORAN KINERJA

Meningkatnya Keamanan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Jumlah Potensi Konflik di Pesisir Selatan	Jumlah Konflik	<i>Jumlah</i>	5	5
Meningkatnya Kualitas Demokrasi di Pesisir Selatan	Persentase Pemilu Aman, Jujur dan Adil	Persentase	<i>Persentase</i>	100%	100%

B. REALISASI ANGGARAN

Sesuai Perubahan APBD tahun anggaran 2021 Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan mengelola anggaran sebesar Rp. 31.095.565.181,- yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. **30.480.429.216** Belanja Pegawai sebesar Rp. 14.992.580.047, Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 12.790.099.169, Belanja Hibah sebesar Rp. 2.489.750.000, Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp. 208.000.000 dan Belanja Modal sebesar Rp. 615.135.965 digunakan untuk Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 605.035.965, dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp. 10.100.000. Realisasi keuangan Belanja Operasi dan Belanja Modal sebesar 98,01% dengan penyerapan dana sebesar Rp. 30.476.888.469,-. Dari sisi akuntabilitas kinerja Program dan Kegiatan Belanja Langsung, Sekretariat Daerah melaksanakan 8 program dan 24 kegiatan. Tabel dan realisasi anggaran pencapaian sasaran strategis tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 24
Realisasi Anggaran Menurut Sasaran dan Indikator Sasaran Strategis Tahun 2021

No.	Sasaran Strategis	Target Tahun 2021	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	68,00 (B)				
		3,2090				
	Meningkatnya Kapabilitas Birokrasi	P-3 (Cukuf Efektif)				
2	Meningkatnya Keterbukaan Informasi dan Pelayanan Publik	80				

LAPORAN KINERJA

		80%	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM			
		100%	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
		4 Dokumen	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	118.079.748	117.747.460	99,72
		100%	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
		124 Org	2 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.786.475.618	12.491.109.039	90,60
		8 Dokumen	3 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	125.989.016	121.499.100	96,44
		20 Laporan	4 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emes teran SKPD	30.529.704	30.348.550	99,41
		100%	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			
		4 Laporan (Persediaan, Laporan Mutasi Barang, Belanja Modal dan RKBMD)	5 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	101.242.680	100.893.350	99,65
		100%	Administrasi Umum Perangkat Daerah			
		4 Paket	6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	31.482.550	30.860.650	98,02
		2 Paket	7 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	33.295.810	33.273.000	99,93
		2 Paket	8 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	259.903.422	253.883.350	97,68
		3 Laporan	9 Fasilitasi Kunjungan Tamu	331.365.790	330.038.722	99,60
		12 Laporan	10 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	335.873.000	333.934.677	99,42
		55 Dokumen	11 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	10.677.240	10.500.400	98,34
		15 Unit	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
		5 Paket	12 Pengadaan Mebel	150.832.330	143.835.770	95,36

LAPORAN KINERJA

		5 Unit	13	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	262.138.115	189.536.750	72,30
		12 Bulan		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
		4 Laporan (Surat Masuk, Surat Keluar, Nota Dinas, Surat Keputusan)	14	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	80.846.790	76.587.100	94,73
		36 Laporan	15	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	997.325.171	964.297.596	96,69
		1 Laporan	16	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	40.120.710	36.959.600	92,12
		5 Laporan	17	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	982.176.260	960.005.600	97,74
		85 unit		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
		7 Unit Mobil/ 4 Unit Motor	18	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	732.315.740	716.745.567	97,87
		15 Unit Mobil/41 Unit Motor	19	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.135.579.490	1.113.967.531	98,10
		4 Unit	20	Pemeliharaan Mebel	-	-	
		79 Unit	21	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	242.250.160	225.105.450	92,92
		2 Unit	22	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	151.540.000	150.884.100	99,57
		2 Unit	23	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	296.345.650	295.146.380	99,60
		12 Bulan		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			
		2 Orang/Bulan	24	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	192.604.429	173.902.742	90,29

LAPORAN KINERJA

		2 Paket	25	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	254.575.000	254.259.138	99,88
		2 Orang	26	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	20.000.000	-	0,00
		±400 Org	27	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	552.000.000	552.000.000	100,00
		12 Bulan		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah			
		1 Paket	28	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	1.026.019.680	1.004.923.551	97,94
		1 Paket	29	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	727.698.900	721.062.600	99,09
		1 Paket	30	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	475.194.020	471.327.900	99,19
		100%		Penataan Organisasi			
		56					
		68					
		P-3 CUKUP EFEKTIF					
		80					
		2 Dokumen	31	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	101.967.970	101.818.946	99,85
		4 Laporan (Inovasi Pelayan Publik, Indeks Kepuasan Masyarakat, Surfey Pelayanan Publik, Fasilitasi Pelayanan Prima)	32	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	39.038.920	38.857.450	99,54
		3 dokumen (Hasil Surfey Internal, Road Map 2021-2026, Indek RB)	33	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	-	-	
		1 Dokumen	34	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	3.588.000	3.580.000	99,78

LAPORAN KINERJA

		4 Dokumen (Lakip, Rencana Aksi, Capaian Kinerja Pemda, Perjanjian Kinerja Pemda)	35 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	69.185.352	68.988.900	99,72
		12 Bulan	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan			
		1 Laporan	36 Fasilitasi Keprotokolan	110.803.800	100.313.550	90,53
		2 Laporan	37 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	645.379.268	607.825.750	94,18
		2 Laporan	38 Pendokumentasian Tugas Pimpinan	137.702.464	132.912.900	96,52
		100%	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			
		100%	Administrasi Tata Pemerintahan			
		3 Dokumen	39 Penataan Administrasi Pemerintahan	97.553.898	96.998.650	99,43
		5 Dokumen	40 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	58.516.520	57.474.150	98,22
		3 Dokumen (LPPD, LKPj, SPM)	41 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	14.149.130	13.948.200	98,58
	Meningkatnya pengamalan nilai-nilai agama dalam kehidupan masyarakat	96,40%				
		100%				
		79 Kali	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat			
		7 Dokumen	42 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	5.043.115.030	4.613.712.928	91,49
		6 Dokumen	43 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	62.509.580	47.602.450	76,15
		4 Dokumen	44 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	341.310.530	284.260.100	83,28

LAPORAN KINERJA

		100%		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum			
		986 dokumen	45	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	87.169.190	83.468.130	95,75
		3 kasus	46	Fasilitasi Bantuan Hukum	82.181.396	73.462.820	89,39
		25 Berita Daerah dan 250 Lembaran Daerah	47	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	51.899.980	49.731.050	95,82
		100%		Fasilitasi Kerjasama Daerah			
		5 Dokumen	48	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	32.026.942	30.054.910	93,84
		100%		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN			
		100%		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian			
		2 Dokumen (BPR Samudra, PDAM)	48	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD			
		2 Laporan (Inflasi, TPAKD)	50	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	43.974.230	36.759.080	83,59
		1 Dokumen	51	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	66.253.990	58.608.440	88,46
		100%		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan			
		4 Dokumen (ASB, HSPK, Pedoman APBD, Sisdur Perjalanan Dinas)	52	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	48.856.392	47.538.510	97,30
		20 Laporan	53	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	46.762.694	45.542.770	97,39
		12 Laporan	54	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	35.717.420	34.602.750	96,88
		100%		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa			
		100 Dokumen	55	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	198.603.650	191.482.573	96,41

LAPORAN KINERJA

		41 Dokumen	56 Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	86.513.724	86.327.950	99,79
		3 Orang	57 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	50.148.468	47.229.350	94,18
		100%	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam			
		5 Dokumen	58 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan			
		3 Dokumen	59 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup			
		2 Dokumen	60 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	56.159.620	54.849.350	97,67
	Meningkatnya Keamanan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	5				
	Meningkatnya Kualitas Demokrasi di Pesisir Selatan	100%				
			Unsur Pemerintahan Umum			
			KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			
		85%	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN			
		85%	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan			
		4 Orang	61 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		54.095.880	

LAPORAN KINERJA

		85%	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK			
		85%	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik			
		13 parpol	62 Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		939.807.819	
		4 Laporan	63 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		380.202.070	
		85%	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN			

LAPORAN KINERJA

		12 Bulan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan			
		4 Laporan	64 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		848.100	
		85%	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA			
		12 Bulan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya			
		75 Siswa per-Kecamatan dan 7 orang per-Nagari	65 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		38.653.700	
		4 Laporan	66 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		9.667.300	

LAPORAN KINERJA

		85%	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL			
		4 Konflik	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial			
		35 kali	67 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		-	
		4 Orang	68 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		115.982.370	
		4 Laporan	69 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		25.043.900	
	JUMLAH			31.095.565.181	30.476.888.469	

LAPORAN KINERJA

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan menggambarkan penekanan pada manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, dimana setiap organisasi pemerintah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Bagi organisasi pemerintah daerah, LKj menjadi bagian dari upaya pertanggung-jawaban dan mendorong akuntabilitas publik. Sementara bagi publik sendiri, LKj akan menjadi ukuran akan penilaian dan juga keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik.

LKj mempunyai makna strategis, sebagai bagian dari penerjemahan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah sebagai bagian dari Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. Pengukuran-pengukuran kinerja telah dilakukan, dan dikuatkan dengan data pendukung yang mengurai bukan hanya pencapaian tahun pelaporan (2021), berdasarkan data yang telah diuraikan dalam LKj ini pencapaian target akhir Renstra Sekretariat Daerah secara umum adalah sangat baik karena dari 8 indikator sasaran yang telah ditetapkan, 7 diantaranya memiliki kinerja **sangat berhasil** dan 1 sasaran lainnya memiliki kinerja yang **berhasil**.

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan IKU yang sudah diuraikan dalam bab III, terlihat bahwa kerja keras telah dilakukan oleh Sekretariat Daerah untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam pembangunan daerah. Upaya ini telah mencakup perumusan dan penetapan kinerja tahunan dan juga menengah sebagai bagian dari kebijakan strategis maupun tahunan daerah, khususnya dalam Renstra dan Renja tahun 2021, yang mencakup juga penentuan program/ kegiatan dan alokasi anggarannya.

LAPORAN KINERJA

Demikian Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Daerah ini dibuat, semoga dapat dijadikan salah satu bahan informasi dalam pembuatan Laporan Kinerja Pemerintah (LKj) Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

Painan, Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESIR SELATAN



MAWARD FROSKA, S.IP.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19670907 198902 1 001

p